

**PERJANJIAN (KONTRAK) ASURANSI MODERN
MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN
MOHAMMAD MUSLEHUDDIN)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi Islam (SE.i)**



Disusun Oleh
WELNI HERMAN
NIM: 10625003963

**PROGRAM S1
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2013**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul: “Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Muhammad Muslehuddin)”

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang perjanjian (kontrak) terutama buku-buku karangan Muhammad Muslehuddin, pendapat serta pemikiran beliau tentang status perjanjian (kontrak) asuransi modern.

Penulis menyimpulkan bahwa menurut Muhammad Muslehuddin Perjanjian Asuransi modern adalah haram disebabkan karena adanya unsur ketidak pastian dan kandungannya tidak tentu. Juga karena ada ta’liq pada kerugian yang belum pasti yang menjadi perjanjian asuransi itu suatu pertaruhan atau permainan yang bergantung pada nasib. Serta Bunga atau pertambahan yang diperoleh melalui perniagaan ini dan penangguhan penyerahan dalam pertukaran uang adalah riba. Dan dalam perjanjian asuransi moderen terdapat unsur ketidak pastian. Asuransi tidak terlepas dari kesalahan riba dan perjudian tetapi tidak menapik bahwa dalam Islam ada perintah mengenai perlindungan atas nyawa dan harta. Untuk melindungi nyawa dan hartanya umat Islam memerlukan asuransi karena darurat. Asuransi belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis sehingga masalah asuransi perlu di ijthadkan dengan pendekatan Qiyas dan Maslahah Murshalah di era kontemporer sekarang ini, dan mengetahui hukumnya merupakan tuntutan zaman dan tantangan bagi mujtahid dalam menentukan hukum menanggapi masalah-masalah kontemporer yang memerlukan status hukum islam. Menurut Fatwa Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (ta’min, takaful’ atau tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk set dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Kita sebagai umat islam harus pintar memilih dan menentukan mana yang baik dan sesuai dengan ajaran agama kita antara asuransi syariah dan asuransi modern.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur atas hidayah dan rahmat dari Allah SWT serta shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah buat junjungan Nabi Besar Muhammad saw, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “PERJANJIAN (KONTRAK) ASURANSI MODERN MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI PEMIKIRAN MUHAMMAD MUSLEHUDDIN)”

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam pembuatan skripsi ini terkadang menghadapi kendala-kendala, namun dengan keridhoan Allah SAW dan doa maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapi ini semua. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan doa dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk melalui karya penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Yang mulia Ayahanda Jamal Koto dan Ibunda Silis Tanjung, yang telah mengorbankan kebahagiaan kepada penulis dan memberikan kasih sayang, perhatian dan doa restu serta dorongan dan nasehat kepada penulis demi kesuksesan penulis selama menimba ilmu pengetahuan.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan para staff.
3. Bapak Dr. Akbarizan, MA, M, Pd selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau serta Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2 dan Wakil dekan 3.

4. Bapak Mawardi S.Ag,M.Si selaku ketua jurusan dan Bapak Darmawan Indra Jaya,M.Ag selaku sekretaris jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syari Kasim Riau.
5. Bapak Drs.H.Muh.Said HM.MA,MM selaku dosen pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan saran-saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dra.Sofia Hardani,MA selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan nasehat-nasehatnya.
7. Suami tercinta Fendi Naldi atas dukungannya dan dengan sabar menemani penulis selama pembuatan skripsi ini.
8. Seluruh kerabat karib dan adek-adekku yang telah banyak member motivasi,semangat yang tidak dapat penulis balas melainkan dengan ucapan terimakasih banyak sebesar-besarnya dengan tulus ikhlas.

Akhirnya penulis hanya bias berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat baik untuk penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Dan akhirnya kepada Allah SWT kita berserah diri dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat,Amiin.

Pekanbaru.07 juni 2013

WELNI HERMAN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	
D. Metodologi Penelitian	
E. Sistematika Penulisan	
BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD MUSLEHUDDIN.....	15
A. Biografi Muhammad Muslehuddin	15
B. Buku-buku Karya Muhammad Muslehuddin	17
BAB III PERJANJIAN (KONTRAK) ASURANSI MODERN MENURUT HUKUM ISLAM	19
A. Pengertian Asuransi.....	19
B. Perjanjian (Kontrak) Asuransi.....	25
C. Asas-asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah	37
D. Islam dan Perjanjian (Kontrak) Asuransi	42

BAB IV PEMIKIRAN MUHAMMAD MUHAMMAD MUSLEHUDDIN PERJANJIAN (KONTRAK).....	46
A. Pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern	46
B. Pandangan Hukum Islam terhadap Status Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern.....	49
C. Status Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern menurut Hukum Islam.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SASARAN	51
A. Kesimpulan	53
B. Saran.....	53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Istilah asuransi atau pertanggungan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu dari kata “verzekering” yang berarti pertanggungan. Dalam suatu asuransi terlibat dua pihak, yaitu yang satu sanggup menanggung atau menjamin, bahwa pihak yang lain akan mendapatkan penggantian suatu kerugian, yang mungkin akan ia derita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semula belum tentu akan terjadi atau semula belum dapat ditentukan akan saat terjadinya. Suatu kontra prestasi dari pertanggungan ini, pihak yang ditanggung itu, diwajibkan membayar sejumlah uang kepada pihak yang menanggung. Apabila kemudian ternyata peristiwa yang dimaksud itu tidak terjadi.¹

Muhammad Muslehuddin memberikan pengertian asuransi sebagai iuran bersama untuk meringankan beban individu kalau-kalau beban tersebut menghancurkannya. Konsep asuransi yang paling sederhana dan umum adalah suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok orang yang bisa ditimpa kerugian, kerugian tersebut menimpa salah seorang di antara mereka, maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.²

Dalam Pasal 246 KUHD, dinyatakan bahwa Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Intermasa, Jakarta, 1986, hal.1

² Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, Lentera, Jakarta, 1999, hal. 3

mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.³

Asuransi selama ini digunakan oleh mayoritas masyarakat (non syariah) bukan merupakan asuransi yang dikenal oleh para pendahulu dari kalangan ahli fiqih, karena tidak termasuk transaksi yang dikenal oleh fikih islam, dan tidak pula dari kalangan para sahabat yang membahas hukumnya.

Konsep dan perjanjian asuransi merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa perkembangan fiqih Islam. Hal ini banyak menimbulkan perbincangan dan pendapat bermunculan dari para ulama fiqih masa kini diantara mereka ada yang membolehkan dan menghalalkan asuransi dan sebahagian yang lainnya melarang dan mengharamkan asuransi.⁴

Konsep asuransi dalam Islam bukanlah hal baru, karena sudah ada sejak zaman Rasulullah yang disebut dengan *aqilah*, bahkan menurut Thomas Patrick dalam bukunya *Dictionary of Islam*, hal ini sudah menjadi kebiasaan suku Arab sejak zaman dulu bahwa jika ada salah satu anggota yang terbunuh oleh anggota suku lain, pewaris korban akan dibayar sejumlah uang darah (*diyat*) sebagai kompensasi oleh saudara terdekat dari pembunuh tersebut yang disebut *Aqila*, harus membayar uang darah atas nama pembunuh.⁵ Dari sinilah asal muasal asuransi mutual mulai terbentuk. Meskipun bentuk

³ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku Satu, hal.64

⁴ Abdul Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*,(Jakarta: PT.Ihtikar Baru Van Hoeve,1999),Cet.ke-3 Jilid 3,hal.827.

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: PT. Gema Insani 2004), Cet ke-2,, hal. 31

asuransi mutual ini merupakan bentuk asuransi paling primitif namun jika dibandingkan dengan asuransi modern akan terdapat beberapa perbedaan pokok. Dasar-dasar asuransi mutual adalah anggota baik secara individu maupun secara bersama-sama sebagai penanggung sekaligus tertanggung. Ditinjau dari sifat organisasinya, tidak ada maksud-maksud mencari keuntungan juga tidak ada maksud eksploitasi memperkaya salah satu pihak dengan memeras yang lain.

Dalam Islam, praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf As, yaitu pada saat ia menafsirkan mimpi dari raja Firaun, tafsiran yang ia sampaikan adalah bahwa *mesir* akan mengalami masa 7 (tujuh) panen yang melimpah dan diikuti dengan masa 7 (tujuh) tahun paceklik, untuk menghadapi masa kesulitan (paceklik) itu Nabi Yusuf As, menyarankan agar menyisihkan sebagian dari hasil panen pada masa tujuh tahun pertama. Saran Nabi Yusuf As, ini diikuti oleh raja Firaun, sehingga masa paceklik dapat ditangani dengan baik.⁶

Dalam perkembangan asuransi selanjutnya banyak pendapat ulama pro dan kontra terhadap asuransi, yakni ada pendapat ulama yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan asuransi. Adapun alasan-alasan para ulama mengharamkan asuransi sebagai berikut:

1. Asuransi merupakan perjanjian pertaruhan
2. Asuransi merupakan perjudian semata-mata
3. Asuransi melibatkan urusan yang tidak mesti

⁶ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2005), Cet. Ke-2., hal. 179

4. Asuransi merupakan suatu usaha yang dirancang untuk meremehkan derajat Allah SWT
5. Jumlah premi tidak tetap, pihak tertanggung tidak akan mengetahui beberapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukannya sampai mati.
6. Jaminan berbunga (bersifat *riba*)
7. *Riba* dilarang dalam Islam.⁷

Munculnya pendapat yang kontra antara lain juga disebabkan oleh sejumlah alasan. Yaitu, asuransi merupakan bisnis pertaruhan dan ketidakpastian. Apalagi jika dikaitkan dengan asuransi jiwa, dimana sebagian pihak berpendapat bahwa asuransi jiwa ini seolah-olah merupakan upaya untuk “menantang” takdir Allah. Bahkan di negara Barat, sudah banyak kasus terjadi, dimana ahli waris tega “mencelakakan” orang tua atau keluarga yang menjadi pemegang polis demi mendapatkan harta dari klaim asuransi. Akibatnya, sebagian ulama di Barat kemudian mengharamkan asuransi jiwa.

Salah satu alasan beberapa ulama mengharamkan asuransi yaitu karena merupakan perjanjian pertaruhan. Perjanjian atau kontrak atau akad dalam asuransi dianggap mengandung unsur perjudian (*maisir*) dan dapat berdampak pada munculnya *gharar* (penipuan). Perjanjian asuransi modern ditiru dari perjanjian asuransi laut Yunani kuno dimana para pedagang laut diberi modal yang dapat digunakan sebagai ganti rugi untuk kerugian yang mungkin akan dihadapi oleh kapal pedagang. Jika kapal mengalami kerusakan dan kerugian maka hutang akan dihapus dan sebaliknya jika

⁷ Muhammad Muslihuddin, *Asuransi dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), Cet. Ke-2, hal. 123

pedagang membawa kapalnya kembali dengan selamat maka mereka berkewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh penanggung dan ditambah dengan pajak sesuai dengan perjanjian awal.

Perjanjian atau kontrak atau akad dalam asuransi merupakan salah satu bagian pokok dalam asuransi dan merupakan pokok pangkal dari tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Kejelasan kontrak atau akad dalam praktik muamalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi.

Perjanjian atau kontrak atau akad adalah sesuatu yang diikatkan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata harus.⁸ Misalnya : setiap hal yang diharuskan seseorang atas dirinya sendiri baik berupa nadzar, sumpah dan sejenisnya disebut akad, demikian juga jual beli dan sejenisnya adalah akad atau perjanjian. Menurut pendapat ulama Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah, akad adalah segala sesuatu yang dikerjakan seseorang berdasarkan keinginan sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan dan gadai.⁹ Kedua definisi tersebut di atas senada dengan definisi akad yang dikemukakan oleh Taufiq yakni: Bahwa akad adalah apa yang menjadi ketetapan seorang

⁸ Abdullah Al-Mushlih dan Sholah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Penerjemah Abu Umar Basyir, Kata Pengantar Adiwarman A. Karim, Cet. I (Jakarta : Darul Haq, 2004), hal. 26

⁹ Muhammad Firdaus N.H, dkk., *Memahami Akad-akad Syari'ah*, Cet. I, (Jakarta : Renaisan, 2005) hal. 13

untuk mengerjakannya yang timbul hanya dari satu kehendak atau dua kehendak.

Menurut Charless L. Knapp dan Nathan M. Crystal mengatakan bahwa, kontrak adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih tidak hanya memberikan kepercayaan, tetapi secara bersama-sama saling pengertian untuk melakukan sesuatu pada masa mendatang oleh seseorang atau keduanya dari mereka.¹⁰

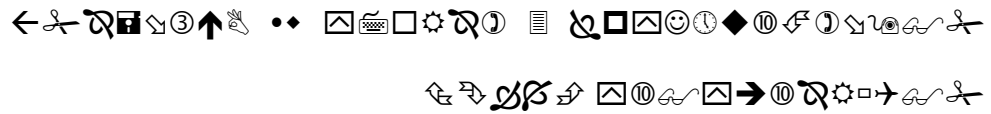
Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

Akad menurut bahasa mempunyai beberapa arti antara lain :

- a. Mengikat yaitu mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung kemudian keduanya menjadi sepotong benda
- b. Sambungan yaitu sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya
- c. Janji sebagai mana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 194 yang berbunyi:



¹⁰ Salim HS, Hukum Kontrak: *Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan I, Jakarta, Sinar Grafika, 2003, hal. 26.



Artinya : *Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang Telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. dan janganlah Engkau hinakan kami di hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji.*¹¹

Sedangkan akad atau kontrak menurut istilah adalah suatu kesepakatan atau komitmen bersama baik lisan, isyarat, maupun tulisan antara dua pihak atau lebih yang memiliki implikasi hukum yang mengikat untuk melaksanakannya.¹²

Pengertian perjanjian atau kontrak (akad) diatas memberikan gambaran bagaimana seharusnya pelaksanaan dalam pembuatan perjanjian sehingga dapat mengacu dan sesuai dengan hukum. Terutama perjanjian atau kontrak dalam asuransi modern yang banyak dipakai masyarakat saat ini. Perjanjian atau kontrak yang terjadi pada asuransi modern diharapkan dapat memenuhi persyaratan dalam Hukum Islam.

Hukum Islam adalah hukum yang sistematis, jelasnya, hukum Islam mengandung doktrin yang lengkap yang saling berkaitan. Setiap institusi ada hubungannya dengan institusi yang lain; contohnya bagian utama dari hukum perjanjian (kontrak) dan tanggung jawab diuraikan melalui perbandingan dengan perjanjian dalam urusan jual beli. Lebih lanjut lagi, hukum itu pada

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya : Mahkota, 1989), hal.194.

¹² Muhammad Salam Madkur (1963). *al-Madkhal al-fiqh al-Islamiyy*. (ttp: Dar al-Nahdah al- 'Arabiyyah), hal.506.

keseluruhannya diakui oleh hukum agama, hukum moral seperti pengharaman riba, pengharaman terhadap jual beli sesuatu yang tidak pasti, memberatkan tentang cara yang adil atau sama (*mithl*).¹³

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber kepada nilai-nilai keislaman, yang dibentuk dari dalil-dail agama Islam. Hukum Islam hanya ditujuakn kepada mereka yang menganut agama Islam dan bukan untuk orang tidak beragama Islam.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa asuransi adalah transaksi perjanjian antara dua pihak; pihak yang satu bekewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.¹⁴

Dr. Muhammad Muslehuddin merupakan salah satu tokoh islam yang menolak asuransi modern. Beliau adalah seorang Guru Besar Hukum Islam di Universitas London. Muhammad Muslehuddin lahir pada 27 Desember 1918 dan meninggal 23 Maret 1983. Muhammad Muslehuddin adalah seorang pemimpin Sufi lahir di Nander Hyderabad di India 's Deccan Plateau. Ayahnya adalah Ghulam Jilani, seorang sarjana Islam. Beliau menghabiskan hidupnya khotbah Islam , dan melayani gerakan Barelvi sampai kematiannya. Di bawah pengawasan ayahnya Ghulam Jilani, Beliau hafal Quran sebelum usia 14.

¹³ Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, hlm. 201 dalam Dr. Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1995), hal. 91

¹⁴ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996),hal 138

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang perjanjian (kontrak) dalam asuransi modern dilihat dari sisi hukum Islam berdasarkan pemikiran Dr. Mohammad Muslehuddin dengan judul: **“Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam (Studi Pemikiran Muhammad Muslehuddin).”**

B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang Masalah diatas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana Pemikiran Muhammad Muslehuddin Tentang Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam
- b. Bagaimana Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam?

2. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesimpangsiuran yang keliru terhadap hasil penelitian, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan pembahasan pada pemikiran-pemikiran Muhammad Muslehuddin Tentang Status Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk dapat mengetahui Pemikiran Muhammad Muslehuddin Tentang Perjanjian (kontrak) asuransi.
 - b. Untuk Mengetahui Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern Menurut Hukum Islam.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Sebagai sumbangan ilmiah penulis khususnya konsep Muhammad Muslehuddin tentang perjanjian (kontrak) asuransi modern menurut hukum islam.
 - b. Sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi S1 pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

D. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*). Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan adalah dengan cara mengkaji dan menelaah buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yaitu tentang perjanjian (kontrak) terutama buku-buku karangan Muhammad Muslehuddin, pendapat serta pemikiran beliau tentang status perjanjian (kontrak) asuransi modern.

2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah pendapat dan pemikiran Muhammad Muslehuiddin, sedangkan objeknya yaitu Perjanjian (kontrak) Asuransi Modern menurut Hukum Islam

3. Sumber Data

Dalam memperoleh data, penulis menggunakan 3 sumber penelitian yang terdiri dari sumber primer, sekunder dan sumber tersier.

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti untuk menjawab masalah atau tujuan penelitian.¹⁵ Dalam penelitian ini yang merupakan data primer yaitu yang diperoleh dari buku karangan Muhammad Muslehuiddin yang berjudul Asuransi Dalam Islam

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan struktur dari historis mengenai variabel-variabel yang telah dikumpulkan dan dihimpun sebelumnya oleh pihak lain¹⁶ yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti tentang Asuransi pada umumnya.

c. Data Tersier

Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti, biasanya data tersebut diperoleh dari pihak ketiga, baik dari objek secara individual (responden) maupun dari suatu Badan yang

¹⁵ Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis. Paradigma Kuantitatif*. (Jakarta: Grasindo. 2007), hal. 168.

¹⁶ *Ibid.* h. 168.

secara sengaja mengungkapkan fakta kepada pihak kedua untuk kemudian pihak kedua tersebut mengeksploitasi fakta dimaksud pada media masa atau media lainnya, untuk kemudian data (fakta) tersebut digunakan kembali oleh sipeneliti sebagai acuan dalam penulisannya. Dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari biografi dan katalog perpustakaan.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan khusus dari data tersebut.
- b. Komperatif, yaitu dengan mencari perbandingan antara data yang diperoleh, kemudian diambil suatu kesimpulan dengan jalan mengkompromikan atau bahkan menguatkan pendapat-pendapat yang dianggap benar.
- c. Deskriptif Analitik, adalah mengumpulkan informasi secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti.

3. Metode Pembahasan

Semua jenis catatan penelitian yang telah terkumpul merupakan bahan mentah yang masih perlu diolah pada tahap selanjutnya yaitu tahap analisis dan sintesis. Dalam menganalisis data yg diperoleh dari objek

pembahasan yang penulis gunakan *Deskriptif Analitik* yaitu mengumpulkan teori-teori yang menyangkut dan berhubungan dengan pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang perjanjian (kontrak) asuransi modern menurut hukum islam.

E. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini lebih terarah secara ilmiah maka penulis memaparkan sistematika penulisan ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada Bab ini akan menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah dan Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : BIOGRAFI MUHAMMAD MUSLEHUDDIN

Pada bab ini akan menguraikan tentang Riwayat Muhammad Muslehuddin, Pendidikan Muhammad Muslehuddin dan Karya-karya Muhammad Muslehuddin.

BAB III : PERJANJIAN (KONTRAK) ASURANSI MODERN MENURUT HUKUM ISLAM

Pada bab ini akan menguraikan tentang Pengertian Asuransi, sumber-sumber hukum asuransi, Perjanjian (kontrak) pada asuransi Islam dan perjanjian (kontrak) asuransi modern.

BAB IV : PEMIKIRAN MUHAMMAD MUSLEHUDDIN TENTANG PERJANJIAN (KONTRAK) ASURANSI MODERN MENURUT HUKUM ISLAM.

Pada bab ini akan diuraikan tentang Pemikiran Muhammad Muslehuddin Tentang Perjanjian (Kontrak) asuransi Modern, dan pandangan hukum islam terhadap perjanjian (kontrak) asuransi modern, Serta Analisis perjanjian (kontrak) asuransi moderen menurut hukum islam.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran-saran.

BAB II

BIOGRAFI MUHAMMAD MUSLEHUDDIN

A. Biografi Muhammad Muslehuddin

Muhammad Muslehuddin Siddiqui lahir pada tanggal 27 Desember 1918 di Nander Hyderabad di India 's Deccan Plateau, beliau adalah seorang pemimpin Sufi. Ayahnya adalah Ghulam Jilani, seorang cendekiawan Islam. Ia menghabiskan hidupnya khotbah Islam, dan melayani Bareilvi sebuah gerakan Sunni Islam yang berasal dari Asia Selatan yang banyak dipengaruhi oleh tasawuf dan membela tradisional sufi sampai kematiannya.¹

Di bawah pengawasan ayahnya Ghulam Jilani, ia hafal Quran sebelum usia 14 tahun. Dia kemudian menerima Dastaar dari Muhammad Abdul Aziz Muhaddis Mubarakpuri. Dengan saran dari Muhammad Abdul Aziz Muhaddis Mubarakpuri, pada tahun 1935 pada usia 17 tahun ia pergi ke Darul-Uloom Asyrafiya universitas di Mubarakpur Azamgarh Uttar Pradesh , di mana ia belajar fiqh , hadits dan mata pelajaran Islam lainnya. Disana ia berguru dengan Abdul Azeez Mubarakpuri, Sanaullah Azami, dan Muhammad Suleman Bhagalpoori. Setelah 8 tahun di universitas ini, ia melakukan perjalanan dengan Abdul Azeez Mubarakpuri pada tahun 1943 menuju Nagpur dan menerima Dastaar-e-Fazeelat dari Mashaikh berbeda dan ulama.

¹ [http:// wikipedia.org](http://wikipedia.org)

Pada tahun 1943, ketika ia berada di Nagpur, ia memimpin shalat Jumat dan menyampaikan khotbah (khutbah), orang-orang yang menawarkan shalat Jumat setelah dia terinspirasi oleh pengetahuan dan cintanya kepada nabi Muhammad. Mereka meminta dia untuk menjadi khatib di sana. Siddiqui menerima permintaan mereka dan terus memberikan Jumat Khotbah dan doa yang dipimpin, ia juga mengajar bahasa Arab di sekolah lokal, "Anjuman Islamia High School" dan juga mendirikan sebuah organisasi bernama "Jamiat Tulba-e-Ahle Sunnah".

Setelah mencapai pendidikan, ia mengalihkan perhatian ke arah mendapatkan pendidikan spiritual,² ketika ia menunjukkan minatnya dalam hal ini untuk gurunya Maulana Shah Muhammad Abdul Azeez Mubarakpuri, ia membawanya pada waktu memutuskan untuk Ghosi Kabupaten Azamgarh, untuk memenuhi Sadrush Syariah Maulana Muhammad Amjad Hakeem Ali Azami, yang datang cuti untuk Ghosi kampung halamannya dari Madarsa Manzar Islam Bareli. Dia kemudian belajar Sahih Bukhari dari Sadrush Syariah dan setelah Asar Doa ia memasuki Qari Muslehuddin di Bay'ah selama 1358 AH.

Pada usia 29, pada tahun 1946 Qari Muslehuddin pergi ke Nagpur, India, dan dalam jemaat Naat Khuwani, tuannya Sadrush Syariah Maulana Muhammad Hakeem Amjad Ali Azami memintanya untuk membacakan Naat, ia membacakan Naat Maulana Jami. Sadrush Syariah Maulana Muhammad Hakeem Amjad Ali Azami juga menangis dan selama naat, ia

² Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.* hal.62

dianugerahkan kepada khilafah Qari Muslehuddin sehingga memberinya izin untuk berbicara atas nama Qadri Orde.

Qari Muslehuddin dikaruniai enam orang anak, dua orang anak perempuan (Nafisa dan Naila) dan empat orang anak laki-laki (Muhammad Salahuddin Siddiqui, Muhammad Misbahuddin Siddiqui, Muhammad Moinuddin Siddiqui, dan Naseem Siddiqui)³.

Pada tanggal 7 Jumadil Thani 1403 H. bertepatan dengan tanggal 23 Maret 1983, pada siang hari, dia merasa sakit, dan mulai membaca Syahadat dan Durood. Siddiqui meninggal di ambulans dalam perjalanan ke rumah sakit karena serangan jantung pada usia 67 tahun. Ribuan orang menghadiri pemakamannya, yang dipimpin oleh Akhtar Raza. Mazar-Nya berdekatan dengan Khorī Taman Masjid, yang sekarang disebut "Masjid Memon Muslehuddin Garden" terletak di Jodia Bazar Kharadar, Karachi.

B. Buku-buku Karya Muhammad Muslehuddin

Adapun beberapa buku karangan dari Muhammad Muslehuddin sebagai berikut:⁴

1. *Banking and Islamic Law*, Islamic Research Academy, Karachi, 1974.
2. *Economics and Islam*, Islamic Publications, Lahore, 1974.
3. *Islamic Jurisprudence and the Rule of Necessity and Need*, Islamic Research Institute, International Islamic University, Islamabad, 1975.
4. *Islamic Law and Social Change*, Islamic Publications, Lahore, 1982.

³ [http:// wikipedia.org](http://wikipedia.org)

⁴ <http://www.bibliography.com.pk>

5. *Islamic Socialism*, Islamic Publications, Lahore, 1975.
6. *Judicial System of Islam*, Dr. Muslehuddin Islamic Trust, International Islamic University, Islamabad, 1988.
7. *Mut`a*, Islamic Publications, Lahore, 1974
8. *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*, Islamic Publications, Lahore, 1977
9. *Sociology and Islam*, Islamic Publications, Lahore, 1977.
10. *Insurance and Islamic Law*, Makazi Maktaba Islami, Delhi, 1995⁵

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Op.Cit.*hal.63

BAB III

PERJANJIAN (KONTRAK) ASURANSI MODERN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Pengertian Asuransi

1. Pengertian Asuransi (Konvensional)

Kata *asuransi* berasal dari bahasa Belanda, *Assurantie*, yang dalam hukum Belanda disebut *Verzekering* yang artinya pertanggungan. Dari peristilahan *assurantie* kemudian timbul istilah *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.¹

Pengertian Asuransi konvensional secara bahasa adalah pertanggungan, istilah pertanggungan dikalangan orang belanda disebut *verzekering*. Hal ini dimaksud melahirkan istilah *assurantie*, *assuradeur* bagi penanggung dan *geassureerde* bagi tertanggung.²

Didalam UU RI Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian merupakan pertanggungan yang didalamnya ada perjanjian antara dua pihak atau lebih, yaitu pihak pertanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.³

¹ Muhammad Syakir Sula, *Op cit*, hal. 07

² Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), Edisi 1 Cet 1, h.

³ *Ibid*, hal. 67

Kitab Undang-Undang (UU) Hukum Dagang pasal 246 memberikan pengertian asuransi sebagai berikut. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan seseorang penanggung mengikat diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak tentu.⁴

Dalam kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 246 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggungan adalah “suatu perjanjian (timbang balik), dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya, karena sesuatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya, karena peristiwa yang tidak tentu (*onzeker voorval*).⁵

Pada garis besarnya usaha asuransi terbagi 2 (dua) kegiatan usaha yang terpisah penyelenggaraan yaitu kegiatan asuransi kerugian (umum) dan asuransi jiwa. Asuransi kerugian (umum) memberikan jaminan bagi berbagai resiko yang mengancam harta benda dan berbagai kepentingan sedangkan asuransi jiwa memberikan jaminan terhadap kehilangan jiwa

⁴ Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002) Edisi Ke-2. hal. 112

⁵ Hasan Ali, *op. cit*, hal. 59

seseorang. Dana yang dikumpulkan berupa premi asuransi dan kemudian diinvestasikan.⁶

Didalam perbankan konvensional terdapat kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh syariat Islam, seperti menerima dan membayar bunga (*riba*), membiayai kegiatan produksi dan perdagangan barang-barang yang diharamkan seperti minuman keras (*haram*), kegiatan yang sangat dekat dengan gambling (*Maisir*) untuk transaksi-transaksi tertentu dalam foreign exchange dealing, serta *Higly And Intended Speculative Transaction* (*gharar*) dalam investment banking.⁷

2. Pengertian Asuransi Syari'ah

Menurut Mushtafa Ahmad Zarga, makna asuransi secara istilah adalah kejadian, adapun metodologi dan gambarannya dapat berbeda-beda. Namun pada intinya, asuransi adalah cara atau metode untuk memelihara manusia dalam menghindari resiko (ancaman) bahaya yang beragam yang akan terjadi dalam hidupnya, dalam perjalanan kegiatan hidupnya atau dalam aktivitas ekonominya.⁸

Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu pembayaran

⁶ Faried Wijaya dan Soetotwo Hadiwigenino. *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE. 1991), Edisi ke-2, hal. 337

⁷ Wirdyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2005), Edisi 1 Cet. ke-2, hal. 38

⁸ Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hal. 29

yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.⁹

Dengan demikian, asuransi dilihat dari segi teori dan sistem, tanpa melihat sarana atau cara-cara kerja dan merealisasikan sistem dan mempraktekan teorinya, sangat relevan tujuan-tujuan umum syari'ah dan diserukan oleh dalil-dalil *juz*-nya. Dikatakan demikian karena asuransi dalam arti tersebut adalah sebuah gabungan kesepakatan untuk saling menolong, yang telah diatur dengan sistem yang sangat rapih, antara sejumlah besar manusia. Tujuannya adalah menghilangkan atau meringankan kerugian dari peristiwa-peristiwa yang terkadang menimpa sebagian mereka.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam disebutkan bahwa Asuransi (*Ar:at-ta'min*) adalah "transaksi perjanjian antara dua pihak yang lain berkewajiban membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat."¹⁰

Dari definisi diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa asuransi syari'ah bersifat saling melindungi dan saling tolong menolong yaitu prinsip yang melindungi dan saling menolong atas dasar ukhwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syari'ah dalam

⁹ Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008), Edisi Revisi. hal. 292

¹⁰ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. (Jakarta: Penada Media, 2004), Edisi 1Cet. Ke-1, hal. 59

- c. Buku II Bab IX Pasal 592 s/d 685, memuat tentang pertanggung jawaban terhadap bahaya-bahaya laut dan bahaya-bahaya perbudakan.
 - d. Buku II Bab X Pasal 686 s/d 695, memuat pertanggung jawaban terhadap bahaya-bahaya pengangkutan di darat dan di sungai-sungai serta perairan pedalaman.
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tanggal 11 Februari 1992 tentang Usaha Perasuransian. 4. Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 tanggal 30 Oktober 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian.
- a. Keputusan-keputusan Menteri Keuangan sebagai petunjuk pelaksanaan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.
 - b. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1250/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 tentang Usaha Asuransi Jiwa.
 - c. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 77/KMK.011/1987 tanggal 10 Februari 1987 tentang Perizinan Agen Asuransi Jiwa di Indonesia.
 - d. Surat Dirjen Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan RI No. 626/MK-11/1987 tanggal 15 September 1987 tentang Pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 77/KMK-011/1987.

- e. Surat Edaran Dirjen Moneter Dalam Negeri Departemen Keuangan RI No. SE-365/MD/1981 tentang Kode Etik Agen Asuransi Jiwa.

B. Asuransi Modern

Institusi asuransi modern secara umum terbagi kepada dua kategori yaitu asuransi yang dibuat dengan kemauan sendiri atau asuransi pedagang dan asuransi yang diharuskan atau asuransi sosial. Keduanya punya prinsip dasar yang sama tetapi juga mempunyai perbedaan dari segi falsafat dan organisasinya.¹²

Asuransi tidak terlepas dari kesalahan riba dan perjudian tetapi tidak menapik bahwa dalam Islam ada perintah mengenai perlindungan atas nyawa dan harta. Syariat atau hukum islam telah menentukan bahwa akhlak merupakan prinsip utama dalam perniagaan. Usaha untuk menambah kekayaan dengan cara yang tidak adil, penipuan, membuat akad yang menggantung dan menangguhkan penyerahan adalah dilarang dalam perniagaan. Pihak manapun yang menjadikan perkara yang tidak pasti sebagai dasar dalam pengurusan niaga mereka berarti mereka melakukan penipuan.

C. Perjanjian (Kontrak) Asuransi

¹² Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam, Op Cit*, hal 158

1. Pengertian Perjanjian (Kontrak)

Perkataan perjanjian atau kontrak dalam Bahasa Arab adalah *aqd* yang dilafal akad yang berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologi fiqih, akad didefinisikan dengan “*pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada obyek perikataan*”.¹³

Istilah kontrak berasal dari bahasa Inggris, yaitu *contracts*. Sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *overeenkomst* (perjanjian). Pengertian perjanjian atau kontrak diatur Pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih."

Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 ini tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, tidak tampak asas konsensualisme, dan bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari dalam doktrin. Menurut doktrin (teori lama) yang disebut perjanjian adalah "Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum."

¹³ Ibm 'Abidin, *Radd al-Muhtar'ala ad-Dur al-Mukhtar*, (Mesir: Amiriyah, tt) jilid II, hal.255

Pencantuman kalimat yang sesuai dengan kehendak syariat maksudnya adalah bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan, pencantuman kalimat berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan qabul).¹⁴

Dalam teori hukum kontrak secara syariah (*nazarriyati al-'uqud*), setiap terjadi transaksi, maka akan terjadi salah satu dari tiga hal berikut. Pertama, kontraknya sah; kedua, kontraknya fasad; dan ketiga, aqadnya batal. Untuk melihat kontrak itu jatuhnya ke mana, maka perlu diperhatikan instrumen mana dari akad yang dipakai dan bagaimana aplikasinya.¹⁵

Atas dasar ini, setiap pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak yang ingin mengikatkan diri dalam suatu akad disebut 'pelaku ijab' dan setiap pernyataan kedua yang diungkapkan pihak lain setelah ijab disebut qabil 'pelaku qabul'; tanpa membedakan antara pihak mana yang memulai pernyataan pertama itu.

Apabila ijab dan qabul telah memenuhi syarat-syaratnya, sesuai dengan ketentuan syara', maka terjadilah perikatan antara pihak-pihak

¹⁴ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Media Pratama, 2000) hal.97

¹⁵ Jafril Khalil. "Akad-Akad Produk Keuangan Islam," Materi Training Certified Islamic Insurance Specialist – CIIS, LPKG-Lembaga Diklat Depkeu, 2003, hal. 1

yang melakukan ijab dan qabul dan muncullah segala akibat hukum dari akad yang disepakati itu.

Akad dalam Islam dibangun atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan penganiayaan. Pada dasarnya harta seorang muslim itu tidak halal kecuali dipindahkan haknya dengan kesukaan hatinya (kerelaan). Akad-akad dalam muamalah sangatlah luas sampai mencakup segala apa saja yang dapat merealisasikan kemaslahatan-kemaslahatan. Kejelasan akad dalam praktek muamalah penting dan menjadi prinsip karena akan menentukan sah tidaknya muamalat tersebut secara syar'i.

Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional, karena akad yang diterapkan di perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Demikian juga halnya dalam asuransi, akad antara perusahaan dengan peserta haruslah jelas. Kejelasan akad yang dipergunakan akan memberikan kejelasan hukum terhadap hubungan kerjasama yang terjadi sehingga beberapa hal yang diharamkan di dalam Islam, di antaranya yaitu, gharar (untung-untungan), unsur maysir (judi), dan riba tidak terjadi.

2. Jenis-jenis perjanjian (kontrak)

Para ahli di bidang kontrak tidak ada kesatuan pandangan tentang pembagian kontrak. Sehingga banyak jenis-jenis kontrak yang muncul menurut pandangan masing-masing para ahli. Ada ahli yang mengkajinya

dari sumber hukumnya, namanya, bentuknya, aspek kewajibannya, maupun aspek larangannya. Berikut jenis-jenis kontrak menurut beberapa kajian¹⁶:

1. Kontrak Menurut Sumber Hukumnya

Kontrak berdasarkan sumber hukumnya merupakan penggolongan kontrak yang didasarkan pada tempat kontrak itu ditemukan. Berdasarkan sumber hukumnya, kontrak dibagi menjadi lima macam, yaitu:

- a. perjanjian yang bersumber dari hukum keluarga, seperti halnya perkawinan;
- b. perjanjian yang bersumber dari kebendaan, yaitu yang berhubungan dengan peralihan hukum benda, misalnya peralihan hak milik;
- c. perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian yang menimbulkan kewajiban;
- d. perjanjian yang bersumber dari hukum acara, yang disebut dengan *bewijsovereenkomst*;
- e. perjanjian yang bersumber dari hukum publik, yang disebut dengan *publieckrechtelijke overeenkomst*.

2. Kontrak Menurut Namanya

Penggolongan ini didasarkan pada nama perjanjian yang tercantum di dalam Pasal 1319 KUH Perdata dan Artikel 1355 NBW. Di dalam

¹⁶ Hendri Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007) hal.51.

Pasal 1319 KUH Perdata dan Artikel 1355 NBW hanya disebutkan dua macam kontrak menurut namanya, yaitu

- a. kontrak nominaat (bernama)
- b. kontrak innominaat (tidak bernama)

3. Kontrak Menurut Bentuknya

Di dalam KUH Perdata, tidak disebutkan secara sistematis tentang bentuk kontrak. Namun apabila kita menelaah berbagai ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata maka kontrak menurut bentuknya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu

- a. kontrak lisan
- b. tertulis.

4. Kontrak Timbal Balik

Penggolongan ini dilihat dari hak dan kewajiban para pihak. Kontrak timbal balik merupakan perjanjian yang dilakukan para pihak menimbulkan hak dan kewajiban-kewajiban pokok seperti pada jual beli dan sewa-menyewa. Perjanjian timbal balik ini dibagi menjadi dua macam, yaitu timbal balik tidak sempurna dan yang sepihak.

- a. Kontrak timbal balik tidak sempurna menimbulkan kewajiban pokok bagi satu pihak, sedangkan lainnya wajib melakukan sesuatu. Di sini tampak ada prestasi-prestasi yang seimbang satu sama lain.
- b. Perjanjian sepihak merupakan perjanjian yang selalu menimbulkan kewajiban-kewajiban hanya bagi satu pihak.

5. Perjanjian Cuma-Cuma atau dengan Alas Hak yang Membebani

Penggolongan ini didasarkan pada keuntungan salah satu pihak dan adanya prestasi dari pihak lainnya. Perjanjian cuma-cuma merupakan perjanjian, yang menurut hukum hanyalah menimbulkan keuntungan bagi salah satu pihak.

6. Perjanjian Berdasarkan Sifatnya

Penggolongan ini didasarkan pada hak kebendaan dan kewajiban yang ditimbulkan dari adanya perjanjian tersebut. Perjanjian menurut sifatnya dibagi menjadi dua macam, yaitu perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan perjanjian obligator.

7. Perjanjian dari Aspek Larangannya

Penggolongan perjanjian berdasarkan larangannya merupakan penggolongan perjanjian dari aspek tidak diperkenankannya para pihak untuk membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Menurut Sutarno, perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu¹⁷:

- a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan hak dan kewajiban kepada kedua pihak yang membuat perjanjian. Misalnya perjanjian jual beli Pasal 1457 KUHPdata dan perjanjian

¹⁷ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003) hal 82.

sewa menyewa Pasal 1548 KUHPdata. Dalam perjanjian jual beli hak dan kewajiban ada di kedua belah pihak. Pihak penjual berkewajiban menyerahkan barang yang dijual dan berhak mendapat pembayaran dan pihak pembeli berkewajiban membayar dan hak menerima barangnya.

- b. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang dibuat dengan meletakkan kewajiban pada salah satu pihak saja. Misalnya perjanjian hibah. Dalam hibah ini kewajiban hanya ada pada orang yang menghibahkan yaitu memberikan barang yang dihibahkan sedangkan penerima hibah tidak mempunyai kewajiban apapun. Penerima hibah hanya berhak menerima barang yang dihibahkan tanpa berkewajiban apapun kepada orang yang menghibahkan.
- c. Perjanjian dengan percuma adalah perjanjian menurut hukum terjadi keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah (*schenking*) dan pinjam pakai Pasal 1666 dan 1740 KUHPdata.
- d. Perjanjian konsensual, riil dan formil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang dianggap sah apabila telah terjadi kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang pasal 1741 KUHPdata dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPdata.

Perjanjian formil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi undang-undang mengharuskan perjanjian tersebut harus dibuat dengan bentuk tertentu secara tertulis dengan akta yang dibuat oleh pejabat

umum notaris atau PPAT. Misalnya jual beli tanah, undang-undang menentukan akta jual beli harus dibuat dengan akta PPAT, perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris.

e. Perjanjian bernama atau khusus dan perjanjian tak bernama

Perjanjian bernama atau khusus adalah perjanjian yang telah diatur dengan ketentuan khusus dalam KUHPerdota Buku ke tiga Bab V sampai dengan bab XVIII. Misalnya perjanjian jual beli, sewa menyewa, hibah dan lain-lain.

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, perjanjian keagenan dan distributor, perjanjian kredit.

Sedangkan dalam syariah terdapat pembagian akad sebagai berikut¹⁸:

1. Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* dalam asuransi syariah merupakan akad *tabarru'* dalam bentuk *lending yourself* dan *giving something* mengingat dalam asuransi syariah ini terdapat beberapa pihak yang terlibat akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* ini mendudukan perusahaan sebagai pengelola dana *tabarru'* (*lending yourself*) dan peserta memberikan kontribusi dana sebagai iuran kebajikan yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah (*giving something*). Perjanjian asuransi syariah merupakan akad takafuli dan didalamnya mengandung prinsip akad *tabarru'*. Perusahaan menerima amanah dari

¹⁸ <http://sithobil.wordpress.com/2012/01/16/macam-macam-akad-dalam-akad-lembaga-keuangan-syariah/>

peserta asuransi syariah untuk mengelola hartanya (premi), yang mana premi tersebut akan dikelola dalam dua rekening yang berbeda yaitu rekening tabungan dan rekening *tabarru'* dan di sisi lain peserta memberikan sebagian dana yang telah disetornya sebagai santunan kebajikan untuk saling berbagi risiko apabila ada diantara peserta yang mengalami musibah.

Akad *tabarru'* yaitu kontrak dimana peserta adalah pihak yang menanggung risiko bersama bukan perusahaan, dalam hal ini perusahaan bukanlah pemilik dana tetapi hanya mengelolanya sesuai dengan amanah dari peserta dan pengelola tidak boleh menggunakan dana-dana tersebut jika tidak ada kuasa dari peserta.

Akad *tabarru'*, menurut Fatwa DSN-MUI No. 53/DSN-MUI/III/2006 tentang *tabarru'* pada asuransi syariah, merupakan akad yang melekat pada semua produk asuransi yaitu akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial.

2. Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan hubungan kontrak investasi para pemilik modal yaitu penyedia dana (*shahibul maal/investor*) dengan pengelola (*mudharib*), *investor* mempercayakan modalnya kepada pengelola untuk digunakan dalam aktivitas perdagangan dalam jangka waktu yang disepakati.

Mudharib dalam hal ini memberikan kontribusi pekerjaan, waktu, dan mengelola usahanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati dalam kontrak. Salah satunya adalah untuk mencapai *keuntungan (profit)* yang nantinya akan dibagi antara investor dengan pengelola berdasarkan proporsi yang disetujui bersama (*nisbah*). Jika terdapat kerugian karena risiko bisnis (*bussiness risk*) dan bukan kelalaian *mudharib (character risk)*, maka kerugian ditanggung oleh *shahibul maal* (penyedia modal). Akad *mudharabah* ini dapat menggunakan prinsip *profit and loss sharing* ataupun *revenue sharing*, dimana bagi hasil ini ditentukan berdasarkan ratio perhitungan bagi hasil yang telah ditentukan dalam perjanjian. Ratio ini dikenal sebagai nisbah bagi hasil.

Akad *mudharabah* dalam asuransi syariah mendudukan peserta sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola), yaitu peserta mempercayakan dananya untuk dikelola. Modal yang dimaksud adalah premi dari peserta yang dibayarkan kepada perusahaan dimana perusahaan, sebagai pemegang amanah terhadap modal yang diterimanya dari *shahibul maal*, akan mengelola atau menginvestasikan dana tersebut melalui investasi yang sesuai dengan ketentuan syariah.

3. Akad Wakalah/Akad Wakalah bil Ujrah

Wakalah atau Wakilah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat dengan menunjuk seseorang mewakilinya dalam hal

melakukan sesuatu secara sukarela atau dengan memberikan imbalan berupa upah (*ujrah*). *Wakalah* merupakan perjanjian mengenai pelimpahan, pendelegasian wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu sebatas atas nama pihak pertama, untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Akad *wakalah/wakalah bil ujrah* ini dapat terjadi antara perusahaan asuransi syariah dengan peserta, perusahaan asuransi dengan marketing/agen, ataupun perusahaan asuransi dengan perusahaan reasuransi.

Akad *wakalah* merupakan perjanjian pendelegasian dan penunjukkan seseorang dalam hal ini agen untuk mewakili badan/perusahaan dalam hal mensosialisasikan, memasarkan dan menjual produk asuransi syariah. Akad *wakalah bil ujrah* merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain dimana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah untuk melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan *ujrah* atas jasa yang telah dilakukan. Akad *wakalah/wakalah bil ujrah* ini merupakan jenis akad yang bersifat *tabarru'* yaitu untuk saling tolong menolong dalam hal ini *lending yourself* dimana perusahaan maupun mitra kerjanya meminjamkan/memberikan jasa kepada pihak lain dalam hal pengelolaan dana melalui investasi syariah sekaligus asuransi syariah. Dengan demikian penulis setuju bahwa asuransi syariah merupakan

ta'awun dan *isti'mar minded* sehingga asuransi ini berbeda dengan asuransi konvensional.

4. Akad *Musyarakah*

Musyarakah (*joint-venture/syirkah*) merupakan akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau keahlian dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Akad *musyarakah* ini kedua pihak menjadi pemilik modal dan pengelola dan terjadi percampuran modal di dalamnya, modal ini dapat berupa modal finansial, modal non finansial (keahlian/ketrampilan, kewirausahaan, barang perdagangan, kepercayaan/reputasi, dan lain-lain) maupun percampuran antara modal finansial dengan non finansial dari para pihak yang berserikat. Apabila dalam kerjasama ini terdapat keuntungan maka pembagian keuntungan didasarkan pada nisbah bagi hasil yang telah disepakati oleh para pihak yang berserikat, dan apabila terjadi kerugian maka pembagiannya didasarkan menurut porsi modal masing-masing pihak yang berserikat.

D. Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah

Dalam hukum kontrak syari'ah terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas perjanjian tersebut diklasifikasikan menjadi asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan

sifatnya umum dan asas-asas perjanjian yang berakibat hukum dan sifatnya khusus. Adapun asas-asas perjanjian yang tidak berakibat hukum dan sifatnya umum adalah¹⁹:

1. Asas Ilahiah atau Asas Tauhid

Kegiatan mu'amalah termasuk perbuatan perjanjian, tidak pernah akan lepas dari nilai-nilai ketauhidan. Dengan demikian manusia memiliki tanggung jawab akan hal itu. Tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab kepada pihak kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, dan tanggung jawab kepada Allah SWT.

2. Asas Kebolehan (Mabda al-Ibahah)

Kebolehan ini dibatasi sampai ada dasar hukum yang melarangnya. Hal ini berarti bahwa Islam memberi kesempatan luas kepada yang berkepentingan untuk mengembangkan bentuk dan macam transaksi baru sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

3. Asas Keadilan (Al 'Adalah)

Dalam asas ini para pihak yang melakukan kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah mereka buat, dan memenuhi semua kewajibannya.

4. Asas Persamaan Atau Kesetaraan

Dalam melakukan kontrak para pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing didasarkan pada asas persamaan dan

¹⁹ Rahmani Timorita Yulianti (2008). *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*. (La_Riba Jurnal Ekonomi Islam Vol II No.1. Juli 2008)

kesetaraan. Tidak diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membedakan manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.

5. Asas Kejujuran dan Kebenaran (Ash Shidiq)

Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam kontrak, maka akan merusak legalitas kontrak dan menimbulkan perselisihan diantara para pihak. Suatu perjanjian dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perjanjian dan bagi masyarakat dan lingkungannya.

6. Asas Tertulis (Al Kitabah)

Suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis agar dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi persengketaan. Selain itu dianjurkan pula jika suatu perjanjian dilaksanakan tidak secara tunai maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya.

7. Asas Iktikad baik (Asas Kepercayaan)

Asas ini mengandung pengertian bahwa para pihak dalam suatu perjanjian harus melaksanakan substansi kontrak atau prestasi berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh serta kemauan baik dari para pihak agar tercapai tujuan perjanjian.

8. Asas Kemanfaatan dan Kemaslahatan

Asas ini mengandung pengertian bahwa semua bentuk perjanjian yang dilakukan harus mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan baik bagi para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian maupun bagi masyarakat sekitar meskipun tidak terdapat ketentuannya dalam al Qur'an dan Al Hadis.²⁰ Asas kemanfaatan dan kemaslahatan ini sangat relevan dengan tujuan hukum Islam secara universal.

9. Asas Konsensualisme atau Asas Kerelaan (mabda' ar-rada'iyyah)

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.²¹

10. Asas Kebebasan Berkontrak (mabda' hurriyah at-ta'aqud)

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan. Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak yang menyepakatinya dan harus dilaksanakan segala hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak

²⁰ M.Tamyiz Muharrom (2003), "*Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM*", dalam *Al Mawarid Jurnal Hukum Islam*, Edisi X tahun 2003, (Yogyakarta: Program Studi Syari'ah FIAI UII).

²¹ Asas konsensualisme muncul diilhami dari hukum Romawi dan hukum Jerman. Di dalam hukum Germani tidak dikenal asas konsensualisme, tetapi yang dikenal adalah perjanjian riil dan perjanjian formal. Perjanjian riil adalah suatu perjanjian yang dibuat dan dilaksanakan secara nyata. Sedangkan yang disebut perjanjian formal adalah suatu perjanjian yang telah ditentukan bentuknya, yaitu tertulis (baik berupa akta autentik maupun akta di bawah tangan). Dalam hukum Romawi dikenal istilah *contractus verbis literis* dan *contractus innominat*. Yang artinya bahwa terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan.

absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan syari'ah Islam, maka perikatan tersebut boleh dilaksanakan.

11. Asas Perjanjian Itu Mengikat

Setiap orang yang melakukan perjanjian terikat kepada isi perjanjian yang telah disepakati bersama pihak lain dalam perjanjian. Sehingga seluruh isi perjanjian adalah sebagai peraturan yang wajib dilakukan oleh para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian.

12. Asas Keseimbangan Prestasi

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian.²² Dalam hal ini dapat diberikan ilustrasi, kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui harta debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan iktikad baik.

13. Asas Kepastian Hukum (Asas Pacta Sunt Servanda)

Asas kepastian hukum ini terkait dengan akibat perjanjian. Dalam hal ini hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

14. Asas Kepribadian (Personalitas)

²² Salim H. S (2006), *Hukum Kontrak ...*, hlm. 13-14, lihat juga Syamsul Anwar (2006). *Kontrak dalam Islam ...*, hlm. 12.

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan. Asas kepribadian dalam perjanjian dikecualikan apabila perjanjian tersebut dilakukan seseorang untuk orang lain yang memberikan kuasa bertindak hukum untuk dirinya atau orang tersebut berwenang atasnya.

15. Asas Kebebasan Berkontrak

Dalam asas-asas perjanjian Islam dianut apa yang disebut dalam ilmu hukum sebagai “asas kebebasan berkontrak” (*mabda’ hurriyah al-ta’aqud*). Asas ini penting untuk dielaborasi lebih lanjut mengingat suatu pertanyaan, apakah konsep dan bentuk transaksi atau akad yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tanpa ada keleluasaan kaum muslimin untuk mengembangkan bentuk-bentuk akad baru sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat di masa kini? Atau apakah kaum muslimin diberi kebebasan untuk membuat transaksi atau akad baru selama akad baru tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam?

Dalam asas kebebasan berkontrak, dimaksudkan kebebasan seseorang untuk membuat perjanjian macam apapun dan berisi apa saja sesuai dengan kepentingannya dalam batas-batas kesusilaan dan ketertiban umum, sekalipun perjanjian tersebut bertentangan dengan aturan-aturan atau pasal-pasal hukum perjanjian.

E. Islam dan Perjanjian (kontrak) Asuransi

Berbicara mengenai hukum terhadap perjanjian (kontrak), artinya berbicara mengenai dua hal, yaitu teori yang mendasari pembentukan suatu kontrak dan teori tentang isi dari kontrak tersebut. Sumber utama dari suatu kontrak / perjanjian adalah asas konsensualisme,²³ yang mana dalam KUH Perdata disebutkan dalam Pasal 1338 ayat (1) “semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Dengan kata lain, kata “sepakat”, adalah mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Disamping itu, asas konsensualisme juga mempunyai arti yang terpenting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya kata sepakat yang mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik terjadinya *consensus*.

Umat Islam yang diwajibkan hidup berlandaskan aturan Al-Qur`an dan As-Sunnah, tentunya kita bertanya-tanya, bagaimana hukumnya asuransi ini. Karena, walaupun ini termasuk mu`amalah yang masuk ke dalam kaidah *al-ashlu fi al-ashyâ` al-ibâhah illa mâ dalla ad-dalîlu ‘alâ tahrîmihi*, dan memang akad asuransi ini tidak terdapat dalam Al-Qur`an dan As-Sunnah, tetapi ada yang terlihat janggal dari akad ini. Di antaranya seperti, hanya dengan membayar premi 50 ribu perbulan, saat meninggal, ahli waris langsung mendapatkan 200 juta. Walaupun premi itu baru sekali bayar, dan ditakdirkan si konsumen (tertanggung) meninggal, maka perusahaan asuransi

²³ Kata konsensualisme berasal dari bahasa latin *consensus* yang berarti sepakat. Asas konsensualisme bukan berarti untuk suatu perjanjian disyaratkan adanya kesepakatan, hal ini disebabkan karena kata sepakat sudah seharusnya terpenuhi dalam setiap perjanjian.

tetap membayarkan biaya santunannya penuh. Dan sebaliknya, jika premi yang dibayarkan sudah banyak, tetapi dalam batas usia 60 (batas usia akad asuransi berakhir) si tertanggung tidak meninggal juga, maka uang premi yang selama itu dibayarkan menjadi milik perusahaan asuransi.

Para ulama menyimpulkan bahwa di dalam akad asuransi terdapat beberapa hal yang diharamkan di dalam Islam, di antaranya yaitu, gharar (untung-untungan), unsur maysir (judi), dan riba²⁴.

1. Gharar

Larangan gharar menjadi pokok dalam mu'amalah maliyah di dalam Islam, yang masuk dalam banyak permasalahan. Seperti hadits yang menyebutkan, bahwa Rasulullah Saw. melarang jual beli yang mengandung penipuan dan jual beli taruhan. (HR. Muslim)

عن أبي هريرة : أن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] نهى
ن بيع الغرر وعن بيع الحصة

Artinya : *Diriwayatkan dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW telah melarang jual beli yang mengandung penipuan dan jual beli taruhan*²⁵

Gharar ini terdapat pada akad asuransi dengan sangat jelas. Karena, masing-masing dari dua pihak yang berakad tidak tahu berapa sebenarnya

²⁴ <http://pwkpersis.wordpress.com/2012/02/29/hukum-asuransi-di-dalam-islam/>

²⁵ Muhammad Dloyya' Ar-Rahman al-A'dhomiy, *Al-Minnah al-Kubro Syarah wa Takhrij as-Sunan as-Sughro*, Kitab al-buyu, Jilid 5, (Maktabah Ar-Rusyd ar-Riyadl, 2001) Cetakan I, Hal. 14

yang harus dia bayar dan berapa yang akan dia ambil. Sehingga asuransi bisa dikatakan sebagai akad majhul yang memiliki resiko yang besar.

Di antara bentuk gharar dalam akad asuransi, bahwa di dalam akad asuransi tidak diketahui batas waktunya, karena resiko yang menjadi inti dari akad tersebut tidak diketahui kapan terjadinya. Dan tidak diketahuinya kapan terjadinya resiko termasuk ke dalam syarat wajib dalam sebuah akad asuransi. Yaitu resiko yang dimaksudkan dalam akad asuransi tidak sedang terjadi, dan ini merupakan unsur asasi dalam akad asuransi.

2. Riba

Akad asuransi mengandung riba, karena ketika terjadi resiko terhadap tertanggung, maka perusahaan asuransi menyerahkan kompensasi yang tertera dalam akad asuransi. Dan jumlahnya bisa lebih kecil atau lebih besar dari premi yang sudah dibayarkan tertanggung. Maka dalam keadaan seperti ini terjadilah yang disebut dengan riba fadhil, karena tidak adanya kesamaan antara besar jumlah dua uang yang ditukar. Demikian juga dengan riba nasi'ah, karena adanya penangguhan salah satu dari dua uang yang ditukar. Dan akad asuransi ini tidak lepas dari pertukaran uang dengan uang, premi dari tertanggung dengan kompensasi dari penanggung.

3. Unsur perjudian

Akad asuransi mengandung unsur perjudian, karena akad ini tergantung kepada resiko, terjadi atautkah tidaknya. Unsur perjudian ini terlihat juga pada, jumlah asuransi yang diterima secara penuh bisa didapatkan oleh tertanggung saat ia baru membayar satu premi, jika terjadinya resiko

BAB IV

PEMIKIRAN MUHAMMAD MUSLEHUDDIN TENTANG PERJANJIAN (KONTRAK) ASURANSI MODERN MENURUT HUKUM ISLAM.

A. Pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern.

Perjanjian pada asuransi moderen merujuk pada perjanjian asuransi laut Yunani Kuno. Pada umumnya perjanjian asuransi laut pada masa itu diberikan kepada pedagang laut supaya dapat digunakan sebagai ganti rugi untuk kerugian yang mungkin akan dihadapi oleh kapal atau kargo. Unsur perjanjian asuransi Yunani telah membentuk satu persediaan seandainya sekuriti terhadap uang pendahuluan itu rugi atau rusak, maka utang akan dihapus.

Perjanjian asuransi modern telah ditentang oleh ulama atau cendikiawan Islam dengan beberapa alasan, sedangkan golongan yang berpaham modern berpendapat bahwa asuransi dibenarkan dalam Islam. Pada umumnya alasan-alasan penentangan para ulama adalah¹:

1. Asuransi adalah perjanjian pertaruhan
2. Asuransi merupakan perjudian semata-mata
3. Asuransi melibatkan urusan yang tidak pasti
4. Asuransi jiwa merupakan suatu usaha yang dirancang untuk meremehkan Iradat Allah

¹ Muslehuddin, Muhammad, *Insurance and Islamic Law*, Makazi Maktaba Islami, Delhi, 1995 hal. 145-146 dalam Muhammad Syakir Sula, *Op cit*, hal62-63

5. Dalam asuransi jiwa, jumlah premi tidak tetap karena tertanggung tidak akan mengetahui berapa kali bayaran angsuran yang dapat dilakukan olehnya sampai mati.
6. Perusahaan asuransi menginvestasikan uang yang telah dibayar oleh tertanggung dalam bentuk jaminan berbunga. Dalam asuransi jiwa, apabila mati dia akan mendapat bayaran yang lebih dari jumlah uang yang telah dibayarnya. Ini adalah riba (faedah atau bunga)
7. Bahwa semua perniagaan asuransi berdasarkan riba dilarang dalam islam.

Syariat atau hukum Islam telah menentukan bahwa akhlak merupakan prinsip utama dalam perniagaan. Oleh sebab itu dalam perniagaan, usaha untuk menambah kekayaan dengan cara yang tidak adil, penipuan (*gharar*), membuat akad yang menggantung dan menangguhkan penyerahan adalah dilarang. Pendek kata segala hal tindakan yang menimbulkan pertikaian akan dikutuk. Pihak manapun yang menjadi perkara tidak pasti sebagai dasar dari dalam pengurusan niaga mereka berarti mereka melakukan penipuan.

Perkara yang terkandung dalam sesuatu perjanjian haruslah tertentu (*ma'lum* atau diketahui). Syarat ini haruslah dipatuhi terutamanya pada barang yang dapat diukur atau ditimbang, yang ada kaitannya dengan hukum riba. Banyak penyebab perjanjian asuransi diharamkan diantaranya usaha mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak wajar dan unsur penipuan merupakan unsure yang paling kentara. Jelasnya, perjanjian asuransi tidak

dapat dilaksanakan dalam Islam melainkan setelah perjanjian-perjanjian itu tidak mengandung perkara-perkara yang diharamkan sama sekali.

Golongan modern beralasan bahwa hakikatnya perjanjian itu diadakan untuk menawarkan jaminan perlindungan untuk menghadapi kerugian akibat sesuatu bencana yang terjadi pada yang diasuransikan tanpa unsur pertambahan kekayaan yang diharamkan pada pihak manapun. Tetapi apakah benar perjanjian asuransi bersesuaian dengan perjanjian jaminan perlindungan menghadapi kerugian yang dinamakan *kafalat*.²

Kafalat menurut Islam terbagi dua yaitu *kafalat al nasf* yaitu *kafalat* bagi manusia dan *kafalat al mal* yang merupakan *kafalat* bagi harta. *Kafalat* dalam Islam diadakan sebagai liabilitas tambahan yang berkaitan dengan soal tuntutan dan ada pihak ketiga yang terlibat dalam *kafalat*. Pihak modern menekankan persamaan diantara perjanjian kafalat dengan perjanjian asuransi dari segi jaminannya yang dita'liqkan pada sesuatu syarat.³

Menurut Muhammad Muslehuddin, perjanjian asuransi haram disebabkan adanya unsur ketidakpastian dan kandungannya tidak tentu. Demikian juga karena ada ta'liq pada kerugian yang belum pasti yang menjadikan perjanjian asuransi suatu pertaruhan atau permainan yang bergantung pada nasib. Asuransi memang merupakan perpindahan tanggungan kerugian dalam bentuk penyerahan uang tunai dari satu pihak kepihak lain, dengan kata lain kebimbangan seseorang dipindahkan kepada orang lain yang sanggup menerimanya sebagai suatu tanggungan dengan

² Muhammad Muslehuddin, *Op. Cit*, hlm.144

³ Ibid

perhitungan pembayaran premi. Inilah diantara ciri-ciri perjanjian asuransi modern yang mengamalkan prinsip perniagaan kapitalis yang mengutamakan kepentingan sendiri.⁴

Ini berbeda dengan asuransi tanggungan bersama karena berdasarkan asuransi ini pihak tertanggung itu juga menjadi penanggung asuransi. Apabila musibah terjadi tanggungan kerugian tidak dipindahkan kepada pihak lain, tetapi ditanggung oleh semua pihak. Peribahasa “berat sama dipikul, ringan sama dijinjing” diterapkan. Perkara yang ditekankan adalah sikap tolong menolong dan menjaga kepentingan bersama dalam setiap komunitas. Jelasnya tolong menolong dan jaminan keselamatan adalah tujuan sebenarnya dari asuransi tanggungan bersama.

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Status Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern

Perjanjian asuransi memang diakui sebagai perjanjian jual-beli, tetapi aktivitas jual beli dalam Islam ada 4 yaitu;

1. *Bay* yaitu jual beli barang tertentu dengan disebut harganya
2. *Muqyadah* (pertukaran) adalah barang tertentu yang dijual dengan pertukaran barang tertentu lainnya.
3. *Sarf* yaitu jual beli mata uang dengan mata uang
4. *Salam* yaitu jual beli nilai uang untuk sesuatu barang pesanan tertentu.⁵

⁴ *Ibid*, hlm.148

Untuk menentukan perjanjian asuransi termasuk dalam aktivitas yang mana, perlu merujuk kepada kandungannya yang dapat kita katakan yaitu uang tunai. Dengan mengabaikan semua pengertian tentang kerugian itu dapat dibuktikan serta dinilai, perjanjian asuransi adalah janji pihak pertama (penanggung asuransi) dengan pertimbangan pembayaran, yakni janji yang disyatakan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu (premi) dari pihak kedua (orang yang ikut asuransi). Seandainya musibah terjadi, pihak pertama akan menafsirkan kerugian dengan nilai uang kemudian membayarkannya kepada pihak kedua tidak melebihi jumlah maksimum yang disetujui. Jelaslah disini masalah yang terjadi dalam perjanjian asuransi adalah pertukaran benda sejenis. Masalah yang terjadi dalam perjanjian asuransi adalah nilai premi dan anti rugi tidak sama. Sekalipun nilai keduanya disamakan, namun perjanjian asuransi masih tetap haram karena tidak dilakukan penyerahan bersamaan pada waktu perjanjian.

Menurut golongan modern perjanjian asuransi bersesuaian dengan perjanjian jaminan perlindungan menghadapi kerugian yang dinamakan kafalat. Kata *kafalat* berasal dari *al kifl* yang berarti berhubungan atau pertambahan. Dalam istilah undang-undang perkataan ini maksudnya adalah hubungan seseorang dengan orang lain dalam urusan membuat tututan. Perjanjian ini dinamakan kafalat karena pertambahan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjalankan tanggungjawabnya terhadap orang lain untuk memenuhi suatu tuntutan. Menurut hukum Islam, penyerahan dan pertukaran

⁵ Mahbubi, *Kifayah*, Jil 3, hlm.2; A Rahim, *Muhammadian Jurisprudence*, hlm.290

hak milik barang hendaklah pada masa akad dan tidak boleh ditangguh-tangguhkan. Berdasarkan uraian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa perjanjian asuransi tidak dapat disamakan dengan kafalat.

C. Status Perjanjian (Kontrak) Asuransi Modern menurut Hukum Islam.

Asuransi adalah suatu perjanjian penjualan sebagaimana yang terbukti dalam polisnya yaitu dokumen mengenai perjanjian. Dalam perjanjian ini penentuan ganti rugi berdasarkan nilai resiko kerugian yang ditentukan pula berdasarkan hukum bilangan yang banyak, dan sebagaimana yang kita ketahui, hukum itu tidak pernah tepat. Hukum itu hanyalah suatu proses spekulasi dan tidaklah dikatakan demikian jika tidak disertai perkara yang tidak pasti. Walaupun pengandaian atau masa kandungan perjanjian itu sudah pasti namun tidak ada satu pihakpun yang mengetahui nilai sebenarnya ganti rugi yang sepantasnya dibayar pada masa ganti rugi itu harus dibayar. Oleh karena itu kadar ganti rugi itu perlu ditentukan sejak awal-awal lagi dan apabila kerugian terjadi ganti rugi dibayar tidak melebihi batas maksimum yang telah disetujui. Dengan ini nyata sekali bahwa unsur ketidakpastian terdapat dalam perjanjian asuransi.⁶

Argumentasi golongan modern yang mengatakan kandungan perjanjian asuransi adalah jaminan keselamatan adalah tidak benar. Berdasarkan hukum Islam bahwa tidak ada sesuatu yang tidak jelas atau sesuatu yang tidak pasti dapat dijadikan kandungan perjanjian penjualan.

⁶ Muhammad Muslehuddin, *Asuransi dalam Islam, Op.Cit*, hlm 149

Perjanjian pengupahan untuk tugas pemeliharaan (*aqd al isti'jhar ala al harasa*) yang dijadikan rujukan oleh golongan modern sebagai perbandingan tidak ada kaitannya dengan alasan mereka dalam hal “keselamatan” tidak menjadi isi perjanjian tetapi hasil yang dikehendaki. Perjanjian ini berbentuk sewaan (*ijarah*) yaitu memindahkan hak menikmati harta sebagai ganjaran untuk sesuatu yang dipertimbangkan. Dalam perjanjian ini, pengabdian memungkinkan dijadikan kandungan, kemudian pihak majikan membayar upah untuk pengabdian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian pengupahan ini tidak dapat disamakan dengan perjanjian asuransi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut Muhammad Muslehuddin Perjanjian Asuransi modern adalah haram disebabkan karena adanya unsur ketidak pastian dan kandungannya tidak tentu. Juga karena ada ta'liq pada kerugian yang belum pasti yang menjadi perjanjian asuransi itu suatu pertarungan atau permainan yang bergantung pada nasib. Serta Bunga atau pertambahan yang diperoleh melalui perniagaan ini dan penanggungan penyerahan dalam pertukaran uang adalah riba. Dan dalam perjanjian asuransi moderen terdapat unsur ketidak pastian.
2. Asuransi tidak terlepas dari kesalahan riba dan perjudian tetapi tidak menapak bahwa dalam Islam ada perintah mengenai perlindungan atas nyawa dan harta. Untuk melindungi nyawa dan hartanya umat Islam memerlukan asuransi karena darurat. Asuransi belum ada hukumnya dalam Al-Quran dan Hadis sehingga masalah asuransi perlu di ijthadkan dengan pendekatan Qiyas dan Maslahah Murshalah di era kontemporer sekarang ini, dan mengetahui hukumnya merupakan tuntutan zaman dan tantangan bagi mujtahid dalam menentukan hukum menanggapi masalah-masalah kontemporer yang memerlukan status hukum islam. Menurut Fatwa

Dewan Asuransi Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Fatwa DSN No.21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah bagian pertama menyebutkan pengertian Asuransi Syariah (ta'min, takaful' atau tadhamun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk set dan atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Kita sebagai umat islam harus pintar memilih dan menentukan mana yang baik dan sesuai dengan ajaran agama kita antara asuransi syariah dan asuransi modern.

B. Saran

Setelah penulis membahas dan meneliti pemikiran Muhammad Muslehuddin tentang perjanjian (kontrak) asuransi modern penulis memberikan saran kepada pembaca bahwa dalam melakukan perjanjian (kontrak) dalam asuransi haruslah diperhatikan unsur-unsur yang terkandung didalamnya. perjanjian (kontrak) asuransi modern dalam hukum Islam haram karena ada unsur-unsur didalam perjanjian (kontrak) asuransi modern tersebut yang membuat ia menjadi haram seperti adanya unsur ketidakpastian dan riba.

Asuransi yang halal menurut hukum islam yaitu asuransi bersama dimana resiko ditanggung bersama oleh perusahaan penanggung asuransi dan

oleh tertanggung. Jadi dalam asuransi bersama ini tidak ada satu pihak pun yang dirugikan dan hal ini sudah tertuang dalam perjanjian (kontrak) asuransi bahwa resiko ditanggung bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Aziz Dahlan, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet.ke-3 Jilid 3(Jakarta: PT.Ihtikar Baru Van Hoeve,1999)

Abdullah Al-Mushlih dan Sholah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Penerjemah Abu Umar Basyir, Kata Pengantar Adiwarman A. Karim, Cet. I (Jakarta : Darul Haq, 2004).

Asep Hermawan. *Penelitian Bisnis. Paradigma Kuantitatif*. (Jakarta: Grasindo. 2007).

Depertemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Surabaya : Mahkota, 1989).

Faried Wijaya dan soetotwo hadiwegenino. *Lembaga-lembaga Keuangan dan Bank*, Edisi ke-2. (Yogyakarta: BPFE. 1991).

Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*. Edisi 1Cet. Ke-1. (Jakarta: Penada Media, 2004).

Heri Sudarsono. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Edisi Ke-2. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002).

[http:// wikipedia.org](http://wikipedia.org)

<http://www.bibliography.com.pk>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/23667/3/Chapter%20II.pdf>

http://ocw.usu.ac.id/course/download/10500000010-hukum-perusahaan/kn_508_slide_syarat-syarat_sahnya_dan_momentum_terjadinya_kontrak.pdf.

<http://pwkpersis.wordpress.com/2012/02/29/hukum-asuransi-di-dalam-islam/>

Ibm ‘Abidin, *Radd al-Muhtar’ala ad-Dur al-Mukhtar*, jilid II. (Amiriyah, Mesir, tt).

Imam Musbikin. *Qawa'id Al-Fiqhiyah*, cet. 1. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001).

Jafril Khalil. “*Akad-Akad Produk Keuangan Islam*,” Materi Training Certified Islamic Insurance Specialist – CIIS, LPKG-Lembaga Diklat Depkeu, 2003.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Revisi. (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008).

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Buku Satu.

Muhammad Muslehuddin, *Menggugat Asuransi Modern*, (Lentera, Jakarta, 1999).

_____, *Insurance and Islamic Law*, (Makazi Maktaba Islami, Delhi, 1995).

_____, *Asuransi dalam Islam*, Cet. Ke-2. (Jakarta: Bumi Aksara, 1997).

Mahbubi, *Kifayah*, Jil 3, hlm.2; A Rahim, *Muhammadian Jurisprudence*, hlm.290

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syari'ah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Cet ke-2. (Jakarta: PT. Gema Insani 2004).

M.Tamyiz Muharrom, “Kontrak Kerja: Antara Kesepakatan dan Tuntutan Pengembangan SDM”, dalam *Al Mawarid Jurnal Hukum Islam*, Edisi X tahun 2003, (Yogyakarta: Program Studi Syari'ah FIAI UII).

Muhammad Salam Madkur (1963). *al-Madkhal al-fiqh al-Islamiyy*. (ttp: Dar al-Nahdah al- 'Arabiyyah), hlm.506.

Muhammad Firdaus N.H, dkk., *Memahami Akad-akad Syari'ah*, Cet. I, (Jakarta : Renaissance, 2005).

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Media Pratama, Jakarta, 2000).

Rahmani Timorita Yulianti . *Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syari'ah*. (La_Riba Jurnal Ekonomi Islam Vol II No.1. Juli 2008)

Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan I, (Jakarta, Sinar Grafika, 2003).

Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, hlm. 201 dalam Dr. Mohammad Muslehuddin, *Asuransi Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara,1995).

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Alfabeta, Bandung, 2003).

Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Edisi 1 Cet. ke-2. (Jakarta: Kencana, 2005).

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Asuransi di Indonesia*, (Jakarta, Intermasa, 1986).

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*. Edisi 1. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).